UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum *(Legal Theory)* dan Teori Peradilan *(Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

B. Dokumen dan Laporan Resmi Lembaga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM, 2024.

PT Gagas Energi Indonesia. "*Dashboard Report* Penjualan 2025 - Utilisasi SPBG." Laporan internal. Jakarta: PT Gagas Energi Indonesia, 2025.

PT Gagas Energi Indonesia. Laporan Tahunan 2025: *Resilient in Transition, Growing with Opportunity*. Jakarta: PT Gagas Energi Indonesia, 2026.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Artikel Jurnal

Ansari, Muhammad Insa. "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2017): 553. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a7.

Cherp, Aleh, Vadim Vinichenko, Jessica Jewell, Elina Brutschin, dan Benjamin Sovacool. *"Integrating Techno-Economic, Socio-Technical and Political Perspectives on National Energy Transitions: A Meta-Theoretical Framework." Energy Research & Social Science* 37 (2018): 175–190. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.015.

Di Silvestre, Maria Luisa, Salvatore Favuzza, Eleonora Riva Sanseverino, dan Gaetano Zizzo. *"How Decarbonization, Digitalization and Decentralization are Changing Key Power Infrastructures." Renewable and Sustainable Energy Reviews* 93 (2018): 483–498. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.068.

Geels, Frank W., Benjamin K. Sovacool, Tim Schwanen, dan Steve Sorrell. *"The Socio-Technical Dynamics of Low-Carbon Transitions." Joule* 1, no. 3 (2017): 463–479. https://doi.org/10.1016/j.joule.2017.09.018.

Gürsan, C., dan V. de Gooyert. *"The Systemic Impact of a Transition Fuel: Does Natural Gas Help or Hinder the Energy Transition?" Renewable and Sustainable Energy Reviews* 138 (2021): 110552. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110552.

Huhta, Kaisa. *"Anchoring the Energy Transition with Legal Certainty in EU Law." Maastricht Journal of European and Comparative Law* 27, no. 4 (2020): 425. https://doi.org/10.1177/1023263X20932056.

Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322.

McCauley, Darren, dan Raphael Heffron. *"Just Transition: Integrating Climate, Energy and Environmental Justice." Energy Policy* 119 (2018): 1–7. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.014.

Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." Legalitas: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2017). 143-144, https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117.

Risdyanta, R. "Bahan Bakar Gas (BBG) Sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Transportasi." Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas 5, no. 2 (2015): 74.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/150.

Widyani, Grace Theresia, dan Chairy. "Strategi Bersaing PT XYZ Dalam Bisnis SPBG." Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan 1, no. 2 (November 2017): 190–198. https://doi.org/10.24912/jmbk.v1i2.4794.

D. Tesis dan Disertasi

Imawan, Riswandha. "Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia dan Korelasinya terhadap Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Silitonga, Marshall Ohan. "Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas: Studi Kasus pada Lima Proyek Konstruksi PT Gagas Energi Indonesia." Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Wirajaya, Awaf. "Strategi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Sektor Transportasi Darat dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional." Tesis Magister, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136).

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43).

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146).

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2435 K/15/MEM/2014 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2436 K/15/MEM/2014 tentang Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020–2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Alokasi Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020–2024.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 82.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi.

Keputusan Menteri Nomor 460.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2025.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 461.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2025–2030.

F. Internet

Abdinagoro, Sri Bramantoro, "OPINI: Perang Ekosistem Bisnis." Bisnis.com, 26 Mei 2026, diakses 10 Juni 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260526/9/1976541/opini-perang-ekosistem-bisnis.

Afriadi, Achmad Dwi, "Ada BBG-Kendaraan Listrik, Mana yang Mau Digeber buat Pangkas Impor BBM?" finance.detik.com. 22 Februari 2024, diakses 1 Juni 2025, https://finance.detik.com/energi/d-7205899/ada-bbg-kendaraan-listrik-mana-yang-mau-digeber-buat-pangkas-impor-bbm.

Aziz, Abdul. "Konversi BBM ke BBG yang Setengah Hati." Tirto.id. 3 Maret 2017, diakses 2 Februari 2026, https://tirto.id/konversi-bbm-ke-bbg-yang-setengah-hati-cj4K.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), "Penggunaan BBG di Indonesia Belum Berkembang, Apa Penyebabnya?" bphmigas.go.id, 3 Juli 2014, diakses 7 April 2026. https://www.bphmigas.go.id/penggunaan-bbg-di-indonesia-belum-berkembang-apa-penyebabnya/.

Detik Finance, "Wow! Modal Bangun SPBG 3 Kali Lipat Dibanding Investasi SPBU." finance.detik.com, 26 Maret 2012, diakses 19 April 2026. https://finance.detik.com/energi/d-1876485/wow-modal-bangun-spbg-3-kali-lipat-dibanding-investasi-spbu.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Tahun 2012, Pemerintah Laksanakan Konversi BBM ke BBG di Jawa-Bali." migas.esdm.go.id. 23 Desember

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2011, diakses 2 Februari 2026. https://migas.esdm.go.id/post/read/Tahun-2012,-Pemerintah-Laksanakan-Konversi-BBM-ke-BBG-di-Jawa-Bali.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan." ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses 26 Mei 2026. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.

Djunaedi Praptono, "Mencermati Kebijakan *Public Service Obligation* pada BUMN," fiskal.kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 16 Februari 2009, diakses tanggal 07 Mei 2026, https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/02/16/114545-mencermati-kebijakan-public-service-obligation-pada-bumn.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Jaga Daya Beli, Menteri ESDM Targetkan Alokasi Subsidi Energi 2024 Rp186,9 Triliun." Media Center ESDM, diakses 19 April 2026. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/jaga-daya-beli-menteri-esdm-targetkan-alokasi-subsidi-energi-2024-rp1869-triliun.

National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. "Order of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China No. 15: Natural Gas Utilization Policy." State Council Gazette 2013 No. 2. gov.cn, diakses 15 Juni 2026. https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2313190.htm.

National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. "Order of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China No. 21: Measures for the Administration of Natural Gas Utilization." ndrc.gov.cn. National Energy Administration, diakses 15 Juni 2026. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202406/t20240619_1387036.html.

National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. "Relevant Officials from the National Energy Administration Answered Reporters' Questions on the 'Measures for the Administration of Natural Gas Utilization." ndrc.gov.cn. National Energy Administration. Diakses 15 Juni 2026. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202406/t20240619_1387698.html.

Pambagio, Agus, "Tantangan Gas Bumi Menggantikan BBM di Transportasi." Detik.com, 14 September 2014, diakses 5 Februari 2026. https://news.detik.com/kolom/d-2689651/tantangan-gas-bumi-menggantikan-bbm-di-transportasi.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia
Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. "City Gas Distribution MIS Report — Juli 2025." pngrb.gov.in. 31 Juli 2025, diakses 10 Juni 2026. https://pngrb.gov.in/data-bank/20250731-CGD-MIS-Report.pdf.

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. "Natural Gas Projections – 2030 Base Case." pngrb.gov.in, diakses 10 Juni 2026. https://pngrb.gov.in/pdf/CaseStudies/20250609_CSR.pdf.

Shana (Iran Petroleum News Agency). *"12 New CNG Stations Operational across Iran."* 11 Februari 202, diakses 10 Juni 2026. https://en.shana.ir/news/654124/12-new-CNG-stations-operational-across-Iran.

Steer. *"Solving the 'Chicken and Egg' Problem of Alternative Fuels."* Steer Insights. Steer Group, diakses 10 Juni 2026, https://steergroup.com/insights/news/solving-chicken-egg-problem-alternative-fuels.

Yudha, Satya Widya. *"Low Oil Prices: Impacts for Indonesia." Pacific Energy Summit Brief. Seattle: National Bureau of Asian Research*, 7 Mei 2015. diakses 10 Juni 2026 https://www.nbr.org/publication/low-oil-prices-impacts-for-indonesia/.

Wahyuni, Willa. "Inkonsistensi Regulasi Salah Satu Faktor Rendahnya Investasi ke Indonesia," hukumonline.com, 22 Mei 2024, 10 Juni 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-regulasi-salah-satu-faktor-rendahnya-investasi-ke-indonesia-lt664d4d62c9aa5/.